

**UPAYA DAN KENDALA PENINGKATAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI**

**Studi Kasus di Nagari Koto Rantang, Kecamatan
Palupuh, Kabupaten Agam**

SKRIPSI



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2021**

**UPAYA DAN KENDALA PENINGKATAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI**

**Studi Kasus di Nagari Koto Rantang, Kecamatan
Palupuh, Kabupaten Agam**

SKRIPSI

**Tugas untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sosial
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas**

Oleh

**FEGI HARISKA
BP.1710812011**

**Pembimbing
Dr. Bob Alfiandi M.Si.**



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2021**

ABSTRAK

FEGI HARISKA. 1710812011. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi Universitas Andalas Padang. Judul Skripsi: Upaya dan Kendala Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Nagari (Studi Kasus di Nagari Koto Rantang, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam) Pembimbing I Dr. Bob Alfiandi M.Si.

Adanya kendala dalam peningkatan partisipasi masyarakat apalagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, baik dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan sampai pada evaluasi pembangunan sering ditemui. Salah satu desa yang mengalami masalah peningkatan partisipasi masyarakat adalah Nagari Koto Rantang yang terletak di Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan upaya dan kendala peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan nagari serta proses perencanaan pembangunan. Penelitian ini menggunakan teori sistem yaitu sistem perilaku menurut Lane dalam Aziz Saleh (1990). Penelitian ini berifat kualitatif dengan analisa data melalui triangulasi di Nagari Koto Rantang. Data yang dikumpulkan adalah data primer yaitu wawancara dan observasi serta data sekunder.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah dalam mempertahankan partisipasi masyarakat dituangkan dalam Undang-Undang Desa No.6 tahun 2014 dan peraturan pemerintah dilanjutkan dalam peraturan menteri dalam negeri, peraturan menteri desa hingga peraturan Bupati Agam. Pemerintah nagari menyiapkan wadah untuk menghimpun aspirasi dari masyarakat yaitu Musyawarah Nagari. Partisipasi masyarakat lebih banyak dalam Musna dibandingkan Musrenbang karena aspirasi masyarakat banyak ditampung dalam Musyawarah Nagari. Hasil usulan kegiatannya yang diajukan dalam Musyawarah nagari akan ditentukan prioritasnya pelaksanaannya di Musrenbang. Selanjutnya diajukan ke tingkat pusat untuk diminta persetujuan. Beberapa kendala partisipasi masyarakat yaitu partisipasi melalui undangan yang menghambat partisipasi masyarakat yang tidak mendapat undangan. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran serta faktor kesibukan.

Kata kunci: kendala, partisipasi, pembangunan

ABSTRACT

FEGI HARISKA. 1710812011. Faculty of Social and Political Sciences, Department of Sociology, Andalas University, Padang. Thesis Title: Efforts and Constraints to Increase Community Participation in Nagari Development Planning (Case Study in Nagari Koto Rintang, Palupuh District, Agam Regency) Advisor I Dr. Bob Alfiandi M.Si.

There are obstacles in increasing community participation, especially community participation in development, both from development planning, development implementation to development evaluation. One of the villages experiencing problems in increasing community participation is Nagari Koto Rintang which is located in Palupuh District, Agam Regency. This study aims to describe and explain the efforts and obstacles to increasing community participation in village development planning. This study uses systems theory, namely the behavioral system according to Lane in Aziz Saleh (1990). This research is qualitative with data analysis through triangulation in Nagari Koto Rintang. The data collected is primary data, namely interviews and observations as well as secondary data.

Based on the law that can be opened, the government's efforts to maintain public participation. Based on Village Law 6 of 2014 and applicable laws and regulations in the Village Minister to the Regent's regulation. The Nagari government provides a forum for gathering aspirations from the community, namely the Nagari Deliberation. Community participation is more in Musna than Musrenbang because people's aspirations are mostly accommodated in Nagari Deliberations. The results of the activity proposals submitted at the Nagari Deliberation will be prioritized for implementation at the Musrenbang. Then submitted to the central level for approval. Some of the obstacles to community participation are participation through invitations that hinder the participation of people who do not receive an invitation. Lack of knowledge and awareness as well as busyness factors.

Keywords: constraints, participation, development